Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 59
November 2023

Artificial Intelligence

Wujud Baru Teknologi

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

Wakil Redaktur Pelaksana:
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Noviarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:

Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat

Tata Kelola AI: Di Tengah Peluang Baru dan Tantangan

Rekan-rekan pembaca yang saya banggakan,

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) saat ini membuka banyak peluang baru bagi masyarakat. Mulai dari otomatisasi bidang industri yang membantu efisiensi proses produksi, *chatbot* dan asisten virtual, hingga penyediaan *platform* pembelajaran otomatis dalam bidang pendidikan.

Seiring pesatnya penggunaan AI di berbagai lini kehidupan, penting bagi kita untuk terus mempertimbangkan implikasi etika, sosial, dan ekonomi yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi ini. Regulasi dan kerangka kerja etika yang kuat menjadi kunci dalam mengelola perkembangan AI agar memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.

Edisi ke-59 kali ini mengangkat upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendorong tata kelola AI yang lebih baik. Di era disrupsi teknologi yang penuh tantangan dan kecanggihan saat ini, kita tidak bisa mengabaikan dampak luar biasa yang dibawa oleh kemajuan teknologi ini.

Ibarat pisau bermata dua, AI menjadi sebuah alat yang tak terelakkan dalam perkembangan teknologi dan memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat, namun juga membawa beragam risiko yang signifikan. Dalam edisi ini, kami akan menggali lebih dalam untuk memahami bagaimana AI menjadi kunci dalam banyak aspek kehidupan kita, sekaligus menyoroti berbagai risiko yang perlu kita waspadai.

Salah satu fokus utama dalam liputan kami adalah tata kelola AI yang diimplementasikan oleh pemerintah guna melindungi masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang aman dan adil bagi perkembangan teknologi ini.

Rhina Anita

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

Sejalan dengan itu, edisi ini juga akan mengupas secara mendalam langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa kecerdasan buatan digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator, merespons perkembangan ini dengan menyusun Surat Edaran pedoman penggunaan etika AI. Pedoman ini menekankan pentingnya pengaturan AI agar tetap aman, berpusat pada manusia, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab.

Dalam edisi ini rekan-rekan dapat membaca secara rinci cakupan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, keamanan, dan kemanusiaan.

Meski diperuntukkan bagi organisasi dan perusahaan yang menggunakan AI, khususnya untuk pelaku usaha yang masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 62015, SE tersebut dapat memberikan gambaran bagi rekan-rekan pembaca tentang arah tata kelola AI yang dirancang pemerintah Indonesia, yang juga didorong untuk diadaptasi pada lingkup global.

Edisi ke-59 juga memuat liputan khusus terkait penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Kominfo, sebuah perhelatan tahunan yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara ini bukan hanya sekadar ajang penghargaan bagi para jurnalis Indonesia yang berprestasi, tetapi juga menjadi panggung untuk merayakan kontribusi mereka dalam menyampaikan informasi yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat.

Rekan-rekan pembaca sekalian,

Majalah Kominfo Next berkomitmen untuk menyajikan informasi yang mendalam dan relevan bagi pembaca setia kami. Selamat menikmati edisi ke-59 November 2023, semoga memberikan wawasan yang berharga dan menjadi panduan bagi pemahaman kita terhadap dunia yang semakin didominasi oleh kecerdasan buatan.

Selamat membaca!

> **...SE tersebut dapat memberikan gambaran bagi rekan-rekan pembaca tentang arah tata kelola AI yang dirancang pemerintah Indonesia**

KOMINFO next

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu yang digelar di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu, 8 November 2023.
Foto: BPMI Setpres/Lukas

Presiden Jokowi: Wujudkan Kontestasi Pemilu yang Berkualitas

Presiden mendorong seluruh pihak bersama-sama mewujudkan kontestasi politik yang berkualitas, damai, dan jauh dari ujaran kebencian.

Presiden Joko Widodo mendorong seluruh pihak untuk mempersiapkan dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara detail. Selain itu, Kepala Negara juga meminta kerja sama para penyelenggara pemilu untuk menjaga suhu politik tetap kondusif.

"Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman dan damai," kata Presiden dalam sambutannya pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu yang digelar di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu, 8 November 2023.

Presiden Jokowi menyadari bahwa tantangan ke depan yang harus dihadapi jelang Pemilu 2024 sangat besar. Untuk itu, Presiden juga mendorong seluruh pihak bersama-sama mewujudkan kontestasi politik yang berkualitas, damai, dan jauh dari ujaran kebencian.

"Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita serta tentu saja proses dan hasil yang *legitimate* dan terpercaya," ucapnya.

Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan situasi kondusif bangsa. Presiden Jokowi meyakini kualitas demokrasi di Indonesia makin baik dan masyarakat juga makin bijak dalam menentukan pilihan.

"Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersuka cita. Bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan suka cita," lanjutnya.

Presiden pun berharap Pemilu 2024 dapat menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan taktis demi kemajuan bangsa Indonesia. "Menghasilkan ide-ide gagasan taktis, ide taktis, solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-wujudkan-kontestasi-pemilu-yang-berkualitas/

Presiden Jokowi Tegaskan Pembangunan IKN Ciptakan Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru

Presiden kembali menekankan bahwa sebesar 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa.

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. Foto: BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada awak media usai melakukan penanaman pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari-dua hari, setahun-dua tahun," ucap Presiden Jokowi.

Presiden kembali menekankan bahwa sebesar 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Kepala Negara menuturkan, dengan adanya pembangunan IKN diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa.

"Dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen (PDB) itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesiasentris, ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu," tutur Presiden.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tegaskan-pembangunan-ikn-ciptakan-titik-pertumbuhan-ekonomi-baru/

Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara memimpin upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih yang digelar di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Senin, 9 Oktober 2023. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Presiden Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan kepada para Tokoh

Acara penganugerahan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan kepada para ahli waris penerima gelar pahlawan nasional dan penerima tanda kehormatan Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh dari berbagai daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 10 November 2023. Acara penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/TH 2023 tanggal 6 November 2023, keenam tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional adalah:

1. Almarhum Ida Dewa Agung Jambe, tokoh dari Provinsi Bali;
2. Almarhum Bataha Santiago, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara;
3. Almarhum M. Tabrani, tokoh dari Provinsi Jawa Timur;
4. Almarhumah Ratu Kalinyamat, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah;
5. Almarhum K.H. Abdul Chalim, tokoh dari Provinsi Jawa Barat; dan
6. Almarhum K.H. Ahmad Hanafiah, tokoh dari Provinsi Lampung.

Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar dan penghargaan dari Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Giovanni Vincenzo Infantino. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/TK/Tahun 2023 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama.

Acara penganugerahan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan kepada para ahli waris penerima gelar pahlawan nasional dan penerima tanda kehormatan Republik Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu para ketua dan wakil ketua lembaga negara, serta para menteri kabinet Indonesia Maju.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-anugerahkan-gelar-pahlawan-nasional-dan-tanda-kehormatan-kepada-para-tokoh/

Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya kepada para pebisnis dalam acara APEC CEO Summit yang digelar di Main Ballroom, Moscone West, San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis, 16 November 2023.
Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Paparkan Sektor Prioritas Investasi Indonesia, Presiden: Ini Waktu Yang Tepat, Manfaatkan Lebih Agresif

Untuk itu, Kepala Negara memaparkan sejumlah sektor prioritas Indonesia yang dapat menjadi peluang investasi bagi para investor, salah satunya adalah dalam sektor hilirisasi industri.

Presiden Joko Widodo menyerukan bahwa Indonesia merupakan pilihan yang tepat dan menjanjikan bagi para investor untuk berinvestasi. Presiden menilai hal tersebut salah satunya dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi akan tumbuh dengan baik serta sejumlah potensi yang dimiliki oleh Indonesia.

"MF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5 persen di tahun 2023 dan di tahun 2024 diperkirakan 5,1 persen," ucap Presiden di hadapan para pebisnis dalam APEC CEO *Summit* yang digelar di *Main Ballroom*, Moscone West, San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis, 16 November 2023.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa selain memiliki potensi yang besar, dimulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia, Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

"Indonesia miliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif," tuturnya.

Untuk itu, Kepala Negara memaparkan sejumlah sektor prioritas Indonesia yang dapat menjadi peluang investasi bagi para investor, salah satunya adalah dalam sektor hilirisasi industri. Presiden menyebut sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar, Indonesia tengah berproses dalam membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi.

"Dan menargetkan memproduksi 600 ribu mobil listrik di 2030, yang akan kita mulai tahun depan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden berharap para pebisnis APEC dapat menjadi bagian dalam proses tersebut. "Beragam insentif dan fasilitas telah disiapkan dan saya berharap pebisnis APEC dapat mengambil bagian besar di sektor ini," ucapnya.

Sektor lain yang menjadi prioritas Indonesia adalah dalam hal transisi energi. Presiden Jokowi menyebut bahwa saat ini Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 3.600 gigawatt dan juga sedang membangun *Green Industrial Park* seluas 30 ribu hektare.

"Di mana untuk pengembangannya dibutuhkan investasi, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan teknologi terkini untuk menghasilkan nilai tambah sekaligus menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan," sambungnya.

Hal selanjutnya yang menjadi prioritas Indonesia adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam. Presiden menilai dalam pembangunan IKN tersebut memiliki potensi investasi yang terbuka dalam sejumlah sektor.

"70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor, infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dengan melihat peluang dan sejumlah sektor prioritas tersebut, Presiden mengajak seluruh pebisnis yang hadir dalam APEC CEO *Summit* untuk dapat berinvestasi di Indonesia.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia dan saya harap Bapak Ibu dapat menfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/paparkan-sektor-prioritas-investasi-indonesia-presiden-ini-waktu-yang-tepat-manfaatkan-lebih-agresif/

Saat Anak Papua Tanya Presiden, Bangun Papua Mulai dari Mana

Khusus di tanah Papua, Presiden berharap metode "Gasing" juga dapat dipelajari oleh seluruh pelajar di semua kabupaten/kota yang ada.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ballroom Padaido Swiss-Belhotel, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada Rabu, 22 November 2023. Foto: BPMI Setpres/Kris

Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ballroom Padaido Swiss-Belhotel, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada Rabu, 22 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden melakukan tanya jawab dengan anak-anak yang hadir dan salah seorang anak bertanya mengenai cara membangun Papua.

"Saya ingin bertanya, jika saya ingin membangun Papua, saya harus memulainya dari mana?" tanya Yosohua Amsal Maniani Kena, siswa SD Negeri 2 Kota Sorong kepada Presiden.

Pertanyaan Yosohua berhasil membuat Presiden Jokowi takjub. Presiden pun menjawab bahwa anak-anak memiliki tugas untuk belajar agar pintar dan kemudian dapat bersama-sama membangun Papua.

"Dimulai dari mana? Dimulai dari belajar, kalau anak-anak belajar semuanya. Belajar—anak-anak tugasnya belajar, dimulai dari situ. Anak-anak belajar, nanti pinter semuanya bersama-sama bangun Papua," jawabnya.

"Kok pinter banget pertanyaanmu sulit, nanti saya beri sepeda," sambung Presiden.

"...Presiden pun menjawab bahwa anak-anak memiliki tugas untuk belajar agar pintar dan kemudian dapat bersama-sama membangun Papua

Dalam pertemuan yang diikuti oleh pelajar SD dan SMP se-Papua yang mempelajari metode hitung cepat "Gasing" (gampang, asyik, menyenangkan) tersebut, Presiden Jokowi turut mengapresiasi Profesor Yohanes Surya yang telah menggagas dan terus memperluas metode tersebut.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Yohanes yang telah terus memperluas Gasing dengan anak-anak, tidak hanya di tanah Papua saja, tetapi di seluruh Tanah Air Indonesia," ucap Presiden

Khusus di tanah Papua, Presiden berharap metode "Gasing" juga dapat dipelajari oleh seluruh pelajar di semua kabupaten/kota yang ada. "Kita harapkan nanti Gasing ini tidak hanya di satu, dua, tiga kabupaten, tetapi di seluruh tanah Papua semuanya bisa belajar berhitung dengan cepat," imbuhnya.

Profesor Yohanes pun menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah sebanyak 19 kabupaten/kota yang ada di tanah Papua telah diajarkan metode "Gasing". Profesor Yohanes mengatakan bahwa selama dalam latihan berhitung cepat tersebut, dirinya menilai anak-anak Papua sangatlah hebat.

"Harapannya besar Pak Presiden, jadi kita targetkan seperti yang waktu itu Pak Presiden sampaikan bagaimana seluruh Papua pandai berhitung kita targetkan sampai Agustus tahun depan itu selesai pak," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi pun memberikan sejumlah pertanyaan hitungan matematika kepada anak-anak yang hadir di sana. Aquilla Mayotag Loji, seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapis, Kabupaten Biak Numfor antusias untuk menerima pertanyaan dari Presiden.

"Aquilla, 458 ditambah 289?" tanya Presiden.

"837," jawab Aquilla benar yang kemudian diberikan sepeda oleh Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Sekretaris Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar, Pj Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur, dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/saat-anak-papua-tanya-presiden-bangun-papua-mulai-dari-mana/

Doxing: Pengungkapan Identitas Daring

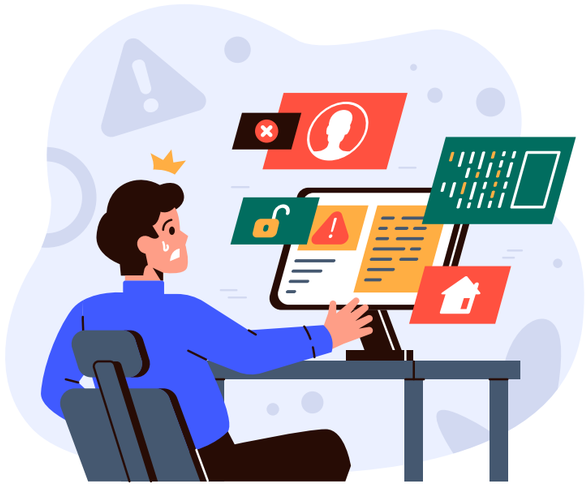

Halo Sobatkom!

Buat kamu yang aktif menggunakan media sosial, tentunya pernah melihat situasi di mana data diri seseorang seperti nama lengkap, nomor HP, hingga alamat rumah disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik data. Praktik ini biasanya dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki motif tertentu, seperti balas dendam, intimidasi, atau perpecahan masyarakat.

Hati-hati ya SobatKom, pelaku *doxing* dapat diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Yuk, kenali apa itu *doxing* dan tindakan apa saja yang tergolong *doxing*, agar SobatKom tidak terjebak dalam perbuatan yang melanggar privasiini.

Doxing, singkatan dari "*dropping documents*," adalah perbuatan membuka data diri seseorang dan menyebarkan informasi pribadi tersebut secara daring tanpa persetujuan, dengan tujuan untuk merugikan target.

Doxing mencakup rincian pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, alamat email, informasi keluarga, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara pribadi.

Doxing umumnya dimulai dengan identifikasi target, baik individu, kelompok, atau organisasi yang dianggap memiliki posisi atau pandangan yang tidak disetujui oleh pelaku *doxing*. Pelaku kemudian mencari dan mengumpulkan informasi pribadi target dari berbagai sumber, termasuk media sosial, basis data publik, atau hasil pencarian daring.

Setelah berhasil mengumpulkan informasi, pelaku *doxing* menyebarkan data tersebut secara luas di internet. Ini dapat melibatkan publikasi di forum, media sosial, atau bahkan situs web khusus yang didedikasikan untuk menyebarluaskan informasi pribadi.

Doxing sering kali ditujukan kepada individu yang terlibat dalam kontroversi, perdebatan online, atau memiliki opini yang kontroversial. Namun kelompok atau organisasi dengan pandangan atau tujuan tertentu juga dapat menjadi target *doxing*. Ini umumnya terjadi dalam konteks konflik ideologis atau politik.

Doxing sangat berbahaya dan merugikan korbannya, karena dapat membahayakan keamanan pribadi target, terutama jika informasi yang diungkapkan mencakup alamat rumah atau nomor telepon. Tak hanya itu, korban juga dapat terganggu psikisnya. Tersebarnya informasi pribadi secara luas dapat menyebabkan dampak psikologis serius, termasuk stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Lebih parah lagi, *doxing* seringkali diikuti oleh pelecehan dan intimidasi *online*. Target dapat mengalami serangan verbal, ancaman, atau bahkan pelecehan fisik.

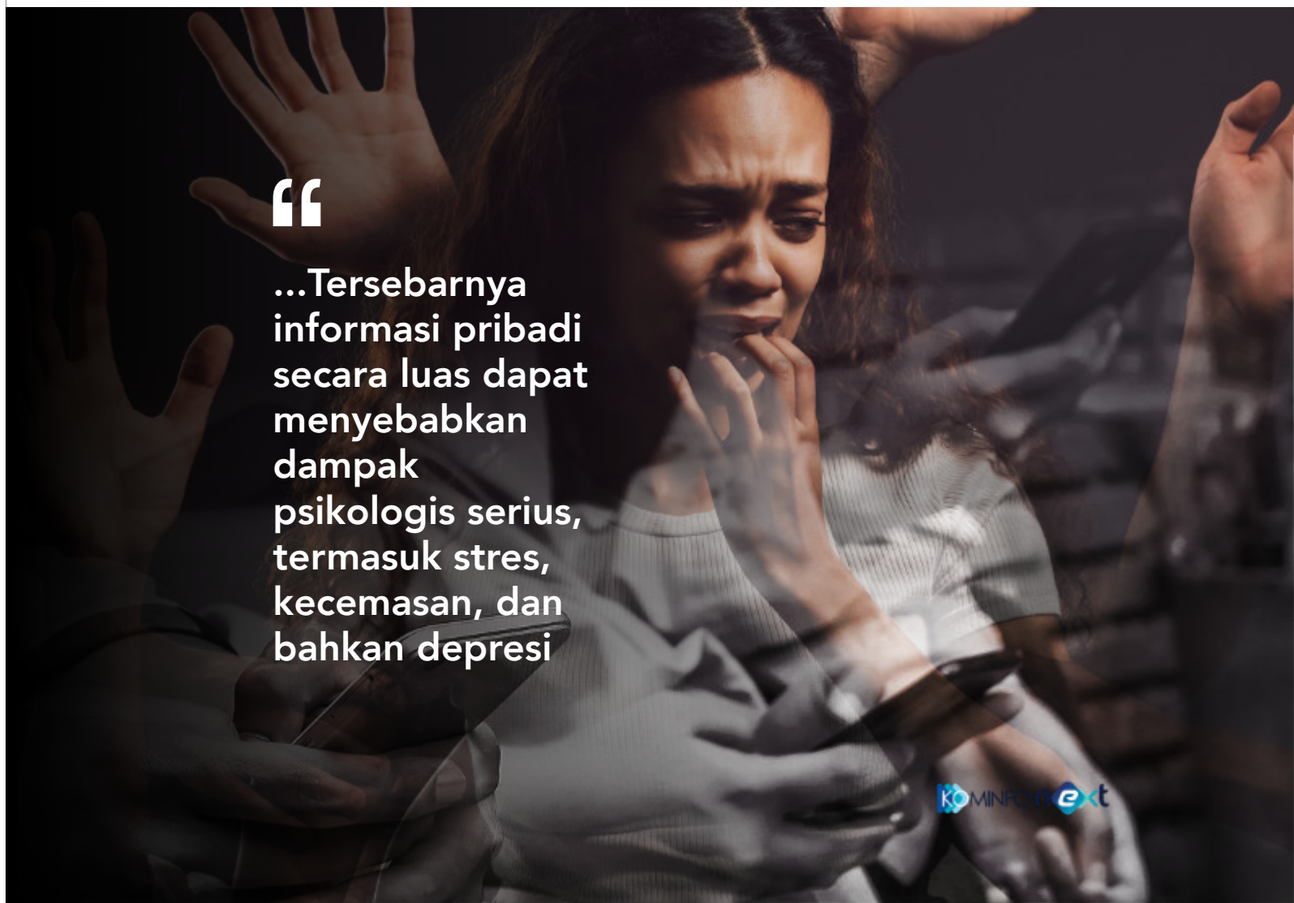

Lalu bagaimana caranya untuk mencegah doxing terjadi pada SobatKom? Berikut ada beberapa langkah yang dapat SobatKom ikuti:

01 Pengaturan Privasi

Mengatur privasi profil media sosial dan *platform* daring lainnya dapat membantu melindungi informasi pribadi.

02 Pendidikan Cybersecurity

Meningkatkan kesadaran tentang risiko *doxing* dan memberikan edukasi tentang langkah-langkah perlindungan siber dapat membantu mencegah serangan tersebut.

03 Melaporkan Pelanggaran

Melaporkan tindakan *doxing* kepada *platform* yang bersangkutan atau pihak berwajib dapat membantu mengambil tindakan preventif.

04 Memantau Jejak Digital

Pemantauan jejak digital secara rutin dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko *doxing* dan mengambil tindakan pencegahan sebelum menjadi serius.

SobatKom, *doxing* merupakan ancaman serius terhadap privasi dan keamanan individu. Melalui kesadaran dan tindakan pencegahan, kita dapat membantu melindungi diri dan orang lain dari dampak negatif *doxing*.

KOMINFO

Sebelum membuat konten, perhatikan 3 hal ini dulu yuk, #SobatKom!

1. Jangan membuat konten yang menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
2. Jangan menampilkan kekerasan, seperti menyakiti diri sendiri, perundungan, pelecehan, dan perilaku kebencian.
3. Jangan lupa kasih *credit* ya.

Yuk, mari kita wujudkan ruang **#BerdigitalBersama** yang lebih sehat!

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menggali Kecerdasan Buatan di Indonesia

Perkembangan, Etika, dan Tata Kelola

> **Indonesia juga mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mengadopsi prinsip inklusivitas bagi semua negara**

Inovasi teknologi, terutama dalam bidang teknologi informasi, telah berkembang pesat dengan tren teknologi digital yang menjadi sorotan utama. Salah satu yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI).

Berbagai negara di dunia tengah "dilanda" disrupsi teknologi digital kecerdasan buatan (AI). AI membawa berbagai ragam potensi dan manfaat positif untuk efisiensi proses bisnis, pengembangan riset medis, hingga sistem penunjang keputusan terotomatisasi.

Begitupun di Indonesia. Penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia cenderung meningkat. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan data yang diterima menunjukkan 22,1% pekerja di Indonesia dari berbagai sektor telah mengimplementasikan pemanfaatan AI untuk mendukung kerja sehari-hari. Fenomena ini mencerminkan kehebohan masyarakat terhadap teknologi ini.

Kecerdasan buatan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemrograman menggunakan komputer untuk melakukan proses data secara cerdas dan cermat. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari linguistik, pemrosesan gambar, hingga visi komputer.

Gagasan tentang apakah mesin dapat berpikir seperti manusia telah muncul sejak tahun 50-an, terutama berkat kontribusi Alan Turing, seorang ahli matematika Inggris. Turing menciptakan mesin yang dapat memecahkan kode Enigma milik Jerman selama Perang Dunia Kedua, yang kemudian menjadi dasar perkembangan komputer.

Meski di tahun 70-an hingga 90-an penggunaan AI tidak terlalu populer, namun perkembangan infrastruktur, seperti internet, dan penemuan superkonduktor, mikroprosesor, serta *chip* kuantum, berdampak besar dalam mempercepat kemajuan riset kecerdasan buatan. Kini, AI memiliki peran signifikan dalam berbagai sektor, dari kesehatan hingga militer.

Perkembangan AI dipicu oleh infrastruktur modern, terutama internet, *Internet of Things* (IoT), dan *cloud computing*. *Big data* menjadi landasan kuat untuk pengembangan AI, dengan kemampuan pemrosesan data yang semakin efisien. Proses machine learning, yang melibatkan model bahasa besar, menjadi bagian integral dalam pengembangan kecerdasan buatan.

Etika dan Regulasi AI

Seiring dengan perkembangan AI yang begitu pesat, kekhawatiran global tentang dampaknya terhadap pekerjaan manusia, keamanan, dan etika pun semakin meningkat. Sebagaimana sisi lain dari mata uang koin, AI juga rentan membawa problematika tersendiri, semisal terjadinya hasil yang bias atau diskriminatif karena asupan data yang tidak memadai, kerentanan pelanggaran data pribadi hingga sirnanya sejumlah lapangan kerja.

"Seiring dengan potensi yang dapat kita manfaatkan dari penggunaan AI, kita juga harus siap untuk memitigasi risikonya. Kita tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi, justru harus mampu merangkulnya dengan terus meningkatkan pengetahuan, agar penggunaan AI dapat mewujudkan masyarakat yang inklusif, memberdayakan, dan produktif," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator, merespons perkembangan ini dengan menyusun Surat Edaran pedoman penggunaan etika AI. Pedoman ini menekankan pentingnya pengaturan AI agar tetap aman, berpusat pada manusia, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab.

Surat Edaran pedoman etika AI tersebut mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, keamanan, dan kemanusiaan. Transparansi menjadi kunci, terutama dalam penggunaan *generative* AI, untuk memastikan sumber data dan menghindari pelanggaran hak cipta. Pedoman ini juga menekankan pada akuntabilitas dan keamanan, serta mengatasi risiko potensial dan meminimalkan dampak negatifnya.

Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, penggunaan AI harus mempertimbangkan kebaikan semua pihak. Indonesia juga mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mengadopsi prinsip inklusivitas bagi semua negara dan mematuhi tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing agar terciptanya tata kelola AI yang inklusif.

> **"Surat Edaran pedoman etika AI tersebut mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, keamanan, dan kemanusiaan...**

"Tidak diragukan lagi, adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa pengembangan AI akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, sekarang dan di masa depan," tandasnya saat menghadiri Forum *AI Safety Summit* (AISS) 2023 di London, Inggris, Rabu (01/11/2020).

Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Pedoman AI tersebut akan menjadi panduan etika untuk organisasi dan perusahaan yang menggunakan AI, khususnya untuk pelaku usaha yang masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 62015, yaitu Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial.

Sejatinya, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Pun pemanfaatan AI masih dapat diakomodasi melalui kebijakan yang telah ada seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

“Namun, apakah regulasi tersebut sudah cukup merespon disrupsi yang ditimbulkan AI? Maka walau Surat Edaran yang tengah kita siapkan ini sifatnya sebagai pedoman, bukan regulasi yang mengikat secara hukum, namun dapat berguna dan bermakna bagi kita semua” tandas Nezar.

Menurutnya, di ranah global, *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) telah menerbitkan '*Recommendation on the Ethics of AI*', yang kemudian diadopsi oleh 193 negara anggota sebagai kerangka Etika AI.

"Dokumen UNESCO tersebut menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk merancang tata kelola AI yang tetap mengutamakan aspek keamanan, proporsionalitas, transparansi, hak asasi manusia, kesetaraan, budaya, dan keberlanjutan di setiap tahapan sistem AI," tuturnya.

Wamen Nezar Patria juga menyontohkan upaya Pemerintah Singapura menggunakan *Singapore's Model AI Governance Framework* untuk memastikan peran manusia dalam pemanfaatan AI.

"Tiongkok juga baru saja mengeluarkan regulasi terkait *generative* AI, dan mitigasi risiko AI terhadap ketidakstabilan sosial. Sedangkan Uni Eropa saat ini tengah memroses kerangka regulasi terbarunya, yaitu *European Union Act* yang akan meregulasi AI berdasarkan tingkatan risikonya," jelasnya.

Libatkan Pemangku Kepentingan

Dalam penyusunan pedoman pemanfaatan AI tersebut, pemerintah turut melibatkan para pemangku kepentingan salah satunya dengan menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Kebijakan Teknologi Kecerdasan Artifisial pada 27 November 2023.

Wamen Nezar pun menegaskan harapannya untuk mendapat masukan yang bernas untuk memperkaya Surat Edaran tersebut. “Melalui FGD hari ini, kami ingin menghimpun masukan dari sejumlah pemangku kepentingan. Ke depan, kita perlu mulai memikirkan regulasi yang *legally binding*, berorientasi pada perlindungan pengguna serta masyarakat luas,” tegas Nezar.

Kementerian Kominfo juga menyerap dan mengolah referensi baik dari nasional maupun global. "Kita ambil saripatinya, kita dialog dengan banyak pihak juga. Ada akademisi, masyarakat sipil, beberapa kementerian yang terkait dengan pelayanan publik seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang aspek pertahanan semua mungkin akan ikut untuk surat edarannya. Bahkan rekan-rekan media pun bisa berikan masukan," jelasnya.

Prioritaskan Kerahasiaan dan Ketersediaan data

Wamenkominfo Nezar Patria menjelaskan, di tengah perkembangan AI yang cukup signifikan, ada beragam risiko yang menjadi ancaman kritis kemajuan AI yang tidak dapat diprediksi akibat kurangnya kepercayaan diri, perencanaan, dan niat baik dalam penggunaan AI.

"Kami juga memiliki kekhawatiran yang mendalam tentang tantangan etika dalam pengembangan AI," ujarnya.

Menurut Wamenkominfo hal itu terjadi akibat peluang dari algoritma dan bias manusia yang dapat memungkinkan penyalahgunaan AI. "Terutama yang terkait dengan pemalsuan dan *phishing*, masalah hukum termasuk hak cipta, penghapusan pekerjaan dan privasi data," ungkapnya.

Oleh karenanya Indonesia meminta para pemangku kepentingan untuk memprioritaskan keamanan AI yang dapat menjamin integritas kerahasiaan dan ketersediaan data.

“Fokus kita tidak hanya untuk meregulasi ekosistem AI di Indonesia, tapi juga mendukung pembahasan lebih lanjut tentang tata kelola AI di tingkat global, mengingat ada beberapa aspek risiko AI yang bersifat internasional. Kita butuh kolaborasi internasional untuk membentuk kerangka kerja yang lebih komprehensif dan terintegrasi,” tandasnya.

Ia menekankan, salah satu upaya meminimalkan risiko denan Surat Edaran Menkominfo mengenai Pedoman Etika Penggunaan AI. Pedoman ini akan menjadi norma dasar bagi para pengembang dan pengguna AI.

“Mengingat AI lebih banyak menggunakan data, maka SE dihadirkan sebagai panduan agar setiap *developer* yang menggunakan AI bisa menjalankannya secara transparan. Melalui SE tersebut, Indonesia memiliki *framework* etik sebelum berangkat kepada regulasi yang lebih komprehensif,” tuturnya.

> **...di tengah perkembangan AI yang cukup signifikan, ada beragam risiko yang menjadi ancaman kritis kemajuan AI**

Masa Depan AI di Indonesia

Perkembangan AI dipicu oleh infrastruktur modern, terutama internet, Internet of Things (IoT), dan cloud computing

Pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia adalah perjalanan yang menarik, dengan tantangan dan peluang yang harus diatasi dan dimanfaatkan. Dialog terbuka dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem AI yang berkelanjutan dan beretika.

Kita akan terus menyaksikan evolusi kecerdasan buatan di Indonesia, di mana teknologi ini diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memperkuat kedudukan Indonesia di panggung teknologi global.

Kehadiran teknologi kecerdasan artifisial (AI) tak dinyana memberikan kontribusi perekonomian global yang mencapai 142,3 Miliar USD pada 2023. Adapun khusus bagi kawasan ASEAN, nilai pasar AI diprediksi akan mencapai 1 Triliun USD pada 2030, dengan kontribusi dari Indonesia sebesar 366 M USD.

Teknologi AI memang memberikan disrupsi di berbagai lini, apakah itu sektor bisnis, dunia pendidikan hingga jasa kreatif. Namun, bak pisau bermata dua, AI juga membawa berbagai tantangan. Sebutlah semisal bias algoritma yang rentan berakibat keputusan diskriminatif, maraknya penyebaran disinformasi bermodalkan *generative* AI, hingga segera hilangnya sejumlah sektor pekerjaan akibat otomasi AI.

Berdasarkan Laporan McKinsey Tahun 2023, lebih dari 600 perusahaan telah menggunakan AI di berbagai sektor bisnis secara global, mulai dari layanan pelanggan, pemasaran, hingga keamanan siber.

“Pemanfaatan AI di Indonesia sangat gencar saat ini dan AI telah membantu sekitar 22,1% pekerja di Indonesia dari berbagai sektor, seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, pemerintahan dan pertahanan,” jelasnya dalam Konferensi Pers Kebijakan Teknologi AI di Indonesia di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Mengutip data Statista dan Kearney & CSET, Wamen Nezar Patria menjelaskan pemanfaatan AI di Indonesia akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar USD 366 Miliar pada tahun 2030. Jumlah itu memberikan setara dengan 40% Pendapatan Domestik Bruto ASEAN yang meningkat dengan pemanfaatan AI.

Saat menghadiri Forum *AI Safety Summit* (AISS) 2023 di London, Inggris, Rabu (01/11/2023), Wamenkominfo Nezar Patria mendorong semua negara mempertimbangkan semua perkembangan dan risiko tersebut. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan tiga hal berkaitan dengan pemanfaatan teknologi AI.

Pertama, agar setiap pihak bertanggung jawab atas penggunaan AI. "Setiap pihak harus menyadari dampak dari AI di sepanjang siklus hidupnya," ujar Wamenkominfo.

Selanjutnya, kedua, untuk memungkinkan *platform* komunikasi global yang lebih kuat dan inklusif untuk secara teratur mendiskusikan perkembangan, kemajuan, dan perilaku pemanfaatan AI.

"Dan, ketiga, tidak menggunakan AI dengan maksud untuk menyakiti, atau memfasilitasi bahaya," jelas Wamen Nezar Patria.

> **"...lebih dari 600 perusahaan telah menggunakan AI di berbagai sektor bisnis secara global, mulai dari layanan pelanggan, pemasaran, hingga keamanan siber.**

Usulkan Kolaborasi Berbasis 3P

Penguatan kolaborasi dalam merespons perkembangan teknologi AI menjadi perhatian seluruh delegasi dalam *AI Safety Summit 2023*. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan satu-satunya cara untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan AI dengan memahami dan memitigasi risiko.

"Indonesia mengusulkan tiga P sebagai fondasi tindakan kolektif dan kolaborasi kita di masa depan, yaitu *Policy* (kebijakan), *Platform* (aplikasi) dan *People* (sumberdaya manusia)," tandasnya dalam Sesi Diskusi AISS 2023: *Building A Shared Understanding of The Risks of Frontier AI and Future Collaboration*, di London, Inggris, Kamis (02/11/2023).

Berkaitan dengan kebijakan, Wamen Nezar Patria menekankan kebijakan mengenai AI harus bermanfaat bagi semua pihak dan berfungsi sebagai dasar melakukan tindakan afirmatif seperti menutup kesenjangan digital, dan memfasilitasi transfer teknologi AI.

"Kebijakan kita harus mencerminkan proyeksi masa depan kita tentang penggunaan AI yang aman, terjamin, dan kuat," tandasnya.

Wamenkominfo menyatakan diskusi mengenai keamanan AI harus ditempatkan melalui *platform* multilateral yang inklusif dan memungkinkan setiap pemangku kepentingan mengekspresikan keprihatinan secara terbuka. "Kita membutuhkan komunikasi yang jujur dan jelas ketika membahas AI, terutama mengenai risikonya dan langkah mitigasinya," ujarnya.

> **"...Kita membutuhkan komunikasi yang jujur dan jelas ketika membahas AI, terutama mengenai risikonya dan langkah mitigasinya**

Mengenai aspek sumberdaya manusia, Wamen Nezar Patria menyatakan Indonesia percaya bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah suatu keharusan. "Tindakan kita di masa depan harus mengarah pada pendekatan yang lebih inklusif dengan memberdayakan manusia," tegasnya.

Menurut Nezar, rekomendasi utama Indonesia perlunya mengambil tindakan afirmatif untuk mengembangkan AI di negara-negara berkembang dengan memfasilitasi kerjasama global yang lebih inklusif, mendesak perusahaan global untuk berkolaborasi dengan pelaku industri lokal, mempersempit kesenjangan digital, dan memfasilitasi transfer teknologi AI.

Pada AISS 2023 menghasilkan deklarasi yang disepakati oleh 29 negara peserta, yaitu *The Bletchley Declaration*. "Ada empat prinsip wajib bagi pengembangan dan pemanfaatan AI, sebagaimana disuratkan dalam *The Bletchley Declaration* tersebut, yaitu AI haruslah *safe* atau aman, *human centric* atau berpusat pada manusia, *trustworthy* atau dapat dipercaya dan *responsible* atau bertanggung-jawab," tandas Nezar.

Indonesia pun telah mengajak sejumlah negara di dunia, termasuk khususnya *global south*, untuk lebih memahami AI. "Indonesia telah menegaskan ajakan untuk bekerjasama menyiapkan tata kelola AI yang melindungi masyarakat dan juga mendukung inovasinya," tegas Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.

Tantangan Bias Algoritma AI dan Ancaman Deep Fake

Meskipun memiliki dampak signifikan, Pemerintah juga telah memetakan sejumlah tantangan atas kehadiran teknologi AI. Wamenkominfo menyontohkan algoritma AI yang berpotensi menimbulkan bias, halusinasi, dan diskriminasi.

"Melalui algoritma dan otomasi yang dapat menghasilkan bias maupun otomasi yang bersifat preskriptif serta penyalahgunaan algoritma yang berpotensi menimbulkan disinformasi. AI itu harus bersifat inklusif dan nondiskriminatif juga. Lalu harus transparan terutama untuk *generative* AI" tandasnya dalam acara *Next Level AI Conference* di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/11/2023).

> **...Teknik Deep Fake bisa memanipulasi video, gambar, dan suara secara digital sesuai dengan pesan yang tidak pernah terjadi di dunia nyata**

Selama tahun 2023, data Home Security Heroes menunjukkan terdapat 95.820 *video Deep Fake* yang tersebar secara global. Teknik *Deep Fake* bisa memanipulasi *video*, gambar, dan suara secara digital sesuai dengan pesan yang tidak pernah terjadi di dunia nyata.

"Ada peningkatan sebesar 550 persen dari tahun 2019 secara global. Hal yang sangat mengkhawatirkan karena bisa disalahgunakan dan dimanipulasi untuk penipuan, pornografi, dan tujuan jahat lain, yang berujung pada penyebaran disinformasi," tandas Wamenkominfo.

Mengutip hasil survei UNESCO & IPSOS (2023), Wamen Nezar Patria menunjukkan lebih dari 80 persen masyarakat yang akan menghadapi pemilihan umum percaya bahwa disinformasi telah berdampak pada politik di negara masing-masing dan khawatir akan dampak dari disinformasi tersebut. "Terlebih, dampak disinformasi bisa sangat luas, mulai dari potensi polarisasi politik, penurunan kepercayaan terhadap jurnalisme hingga proses demokrasi sendiri," tegasnya.

Di era proliferasi AI dan ancaman disinformasi yang makin intensif tersebut, Wamenkominfo menilai kelompok rentan memiliki risiko yang lebih tinggi terdampak dan menjadi korban penyalahgunaan teknologi.

Menurutnya, ada tiga dampak dan viktimisasi yang mungkin terjadi, pertama, profiling yang didasarkan pada algoritma AI cenderung bias dan dapat disalahgunakan untuk menargetkan kelompok rentan. Kedua, dalam beberapa kasus politik dan sosial yang terjadi di platform digital, persebaran disinformasi kerap ditujukan dengan sengaja menargetkan dan merugikan kelompok rentan.

"Ketiga, perempuan menjadi target dalam muatan pornografi yang sengaja diciptakan melalui teknologi *Deep Fake*," ujarnya Seminar Nasional "Disinformasi dan Kelompok Rentan di Era Manipulasi Media Digital" di Wisma Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (16/11/2023).

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo memberikan perhatian penuh pada kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat yang tinggal di area rural, kelompok disabilitas, lansia, dan kaum muda.

"Pendekatan yang inklusif mampu menghadirkan teknologi digital yang dapat diakses dan diadopsi semua orang, dan mendukung penggunaan internet serta layanan digital yang bermakna dan aman," tandasnya.

> **"...perempuan menjadi target dalam muatan pornografi yang sengaja diciptakan melalui teknologi Deep Fake**

Optimalkan Pelindungan Anak

Dalam hal pelindungan anak, terutama di era perkembangan AI saat ini, Indonesia telah mengadopsi panduan pelindungan anak di ranah daring yang dirilis *International Telecommunication Union* (ITU) sejak tahun 2009 dan telah diperbarui di tahun 2020.

"Panduan ini ditujukan kepada 4 kelompok, yaitu anak-anak, orang tua/wali/atau edukator, industri, dan pembuat kebijakan," ujarnya saat membuka Seri Duskusi Publik Kecerdasan Buatan (AI) dengan tema *AI for Child Online Protection* di Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

Menurut Wamen Nezar Patria, panduan tersebut dapat digunakan untuk menciptakan ruang digital yang aman, partisipatori, inklusif, dan tepat secara usia untuk anak-anak. Mengutip data UNICEF pada 2023, terdapat 175.000 anak yang menjadi pengguna baru internet setiap hari atau 1 anak setiap detik. "Di Indonesia sendiri, sebanyak 30 juta anak menjadi pengguna internet," ujar Wamenkominfo.

Wamenkominfo juga menunjukkan juga UNESCO's *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* yang menjadi acuan dalam melindungi anak-anak di ruang digital.

> **"...pada 2023, terdapat 175.000 anak yang menjadi pengguna baru internet setiap hari**

"(Di dalamnya) terdapat bahasan seputar penggunaan AI dan dampaknya bagi anak-anak, serta bagaimana tata kelola AI yang dapat memenuhi hak-hak dasar anak," tuturnya.

Menurut Wamen Nezar Patria banyak negara di dunia memiliki kekhawatiran yang sama terhadap perkembangan AI. Bahkan, setiap negara mencari cara untuk memitigasi risiko penggunaan AI, terutama bagi anak-anak. Tingginya jumlah pengguna internet usia anak menghadirkan ancaman dan risiko yang besar, seperti paparan konten negatif, perundungan siber (*cyberbullying*) kepada anak, bahaya kebocoran data anak, hingga *Child Sexual Abuse Material*.

"Mereka lah yang akan menjadi generasi penerus dan mereka sudah akrab dengan AI sejak dini, kita bisa bayangkan 10-15 tahun lagi mereka lah pengguna AI yang sangat aktif," ujarnya.

Dalam penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), Wamenkominfo menekankan arti penting filter dan moderasi konten secara otomatis untuk konten negatif.

"AI dapat digunakan melakukan deteksi *cyberbullying* melalui upaya pengaman dan deteksi pola pelaku *cyberbullying*, serta mengidentifikasi pelaku kekerasan *online* melalui deteksi perilaku di ruang digital," tandasnya.

Tidak hanya itu, menurut Wamen Nezar Patria, teknologi AI juga memiliki peluang untuk membantu menghadirkan pelindungan keamanan dan dan privasi. "AI juga bisa membantu orang tua memantau *screen time*, tentu saja supaya anak tidak terlalu larut dalam penggunaan digital dan mengatasi kecanduannya juga," tuturnya.

Di sisi lain, keberadaan teknologi generative AI seperti *deepfake* yang memungkinkan manipulasi konten foto atau video dan produksi konten-konten negatif dengan anak sebagai korban. Oleh karena itu, Wamen Nezar Patria mendorong adanya diskusi oleh semua pihak yang berhubungan dengan anak-anak untuk memanfaatkan teknologi AI demi kemajuan anak-anak di Indonesia.

"Pemanfaatan AI di kelompok yang selama ini berinteraksi dengan pendidikan anak-anak, baik para advokasi hak-hak anak, kemudian mereka yang terlibat dalam pendidikan anak-anak, AI ini saya kira sangat penting. (Anak-anak) mungkin lebih jago dari generasi sebelumnya karena mereka sudah berkenalan dengan AI sejak usia dini. Jadi perlu ada panduan-panduan etis, ataupun mitigasi risiko-risiko negatif yang mungkin terjadi pada anak," ungkapnya.

Gunakan AI untuk Layanan Publik

Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam layanan publik memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih akurat, efisien, dan lebih baik kepada masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menjelaskan Indonesia telah mengembangkan sistem berbasis AI untuk mengidentifikasi dan melawan disinformasi.

"Saat ini kami sedang mengembangkan sistem AI yang mengimplementasikan teknologi Natural Language Processing untuk melengkapi teknologi yang sudah ada," jelasnya dalam *AI Safety Summit 2023 Session 2: Sharing Global Opportunities for AI Better Public Services: Building A Shared Understanding of The Risks of Frontier AI and Future Collaboration* di London, Inggris, Kamis (02/11/2023).

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga berencana untuk mengembangkan ekosistem *big data* berbasis AI pada layanan kesehatan. "Ekosistem ini diharapkan dapat meningkatkan sistem kesehatan nasional menjadi lebih akurat, komprehensif, dan berbasis data," ungkap Wamen Nezar Patria.

Guna mendukung rencana tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengerahkan upaya untuk meningkatkan kapasitas keterampilan digital. Melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS), Kementerian Kominfo membekali pegawai negeri sipil dan pekerja sektor swasta terpilih dengan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan sistem berbasis AI.

"Program DTS menyediakan berbagai kursus yang berkaitan dengan AI seperti *AI for Developer* dan *AI for Data Scientist*," jelas Wamenkominfo.

> **"...Melalui program Digital Talent Scholarship (DTS), Kementerian Kominfo membekali pegawai negeri sipil dan pekerja sektor swasta terpilih dengan keterampilan yang diperlukan**

Adaptasi AI untuk Kelola Lingkungan Hidup

Adaptasi terhadap perkembangan AI juga berpeluang mendukung transformasi ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

"Sebagai salah satu teknologi digital yang kerap dimanfaatkan untuk penanganan isu lingkungan, teknologi artificial intelligence memiliki potensi yang signifikan bagi transformasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan," jelas Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam Green Press Community (SIEJ) bertema "Komunikasi, Jurnalisme dan AI dan Digitalisasi dalam Narasi Isu Lingkungan" di Gedung Usmar Ismail Hall Jakarta Selatan, Rabu (08/11/2023).

Menurut Wamenkominfo, kehadiran teknologi digital berbasi AI sejatinya dapat membantu upaya menghadirkan lingkungan hidup berkelanjutan yang berdampak baik pada pengurangan emisi karbon dan berkaitan dengan sumber daya alam.

"Berdasarkan data dari *UN Environment Program* Tahun 2023, terlihat dari penanganan lingkungan hidup yang berpotensi mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 20% dan mengurangi pemanfaatan sumber daya alam bagi proses produksi sebesar 90%," jelasnya.

Wamen Nezar Patria menunjukkan data kontribusi teknologi hijau berbasis AI bagi perekonomian global diprediksi mencapai USD5,2 Triliun pada tahun 2030. Selain itu, penerapan AI dapat mengurangi emisi gas rumah kaca global sebesar 4% setara dengan emisi tahunan yang dihasilkan oleh Australia, Kanada, dan Jepang.

"Beberapa contoh pemanfaatan AI antara lain utilisasi AI dalam kendaraan otonom elektrik yang ramah lingkungan, smart agriculture yang mendorong keberlanjutan pangan, serta inovasi berbasis AI yang memberikan informasi *real time* mengenai titik polusi udara, kemacetan lalu lintas, hingga titik-titik pembabatan hutan dan perburuan liar," tuturnya.

Puncak AJK 2023, Menkominfo Apresiasi Jurnalis

Saksi Kemajuan Transformasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menggelar ajang apresiasi Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK) 2023. Diselenggarakan sejak tahun 2018, Anugerah Jurnalistik Kominfo saat ini telah memasuki tahun keenam penyelenggaraannya.

"Selama enam tahun berturut-turut melalui AJK, Kementerian Kominfo melibatkan setidaknya 2.000 jurnalis tanah air dengan lebih dari 5.000 karya. Saya mengapresiasi dedikasi dan kontribusi dalam meliput kemajuan transformasi digital nasional," tuturnya dalam Acara Puncak AJK 2023 di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

Anugerah Jurnalistik Kominfo tahun 2023 mengangkat tema Peta Jalan Menuju Indonesia Digital. Tema tersebut menggambarkan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* dalam mendorong percepatan transformasi digital di tanah air.

Perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, tak salah jika Indonesia didaulat sebagai negara yang berpengaruh dari aspek penetrasi pengguna internet, media sosial, *platform e-commerce*, perangkat digital hingga pemanfaatan teknologi di berbagai sektor strategis.

Pencanangan Indonesia Digital lahir sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang juga menjadi wujud upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital nasional yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. Selain itu juga menggambarkan sebuah proses transformatif yang membutuhkan upaya luar biasa dari seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, namun juga media.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia digital tidak akan diketahui dan dirasakan oleh masyarakat tanpa adanya dukungan dari rekan-rekan jurnalis dan pers Tanah Air. Rekan-rekan pers dan jurnalis memainkan peranan penting dalam menyebarkan berbagai program, kebijakan, dan capaian Kementerian Kominfo mendorong keterjangkauan, pemanfaatan, serta kemajuan teknologi digital Tanah Air hingga ke seluruh penjuru Nusantara.

Adapun 10 karya terbaik dari masing-masing lima kategori lomba tersebut akan diabadikan dalam Buku 50 Karya Terbaik AJK 2023. "Tentunya bersama karya lainnya dalam buku 50 karya terbaik Anugerah Jurnalistik Kominfo 2023," ujar Menkominfo.

Dalam sambutannya, Menteri Budi Arie mengisahkan pengalaman saat menjadi jurnalis. Menurutnya, tanggung jawab jurnalis memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan penyebaran informasi yang kredibel, objektif, independen, dan berkualitas.

"Merupakan suatu kebanggaan bagi Pak Wamen Nezar Patria dan saya, yang memiliki latar belakang jurnalistik bisa hadir di tengah rekan-rekan jurnalis sekalian. Bagi kami, jurnalis adalah insan pemikul tanggung jawab besar," ungkapnya.

Menkominfo juga mengapresiasi seluruh dewan juri dari lima kategori lomba yang bekerja secara profesional dan objektif.

"Saya ucapkan selamat dan sukses kepada para pemenang AJK 2023. Saya juga sampaikan apresiasi kepada dewan juri yang telah memberikan penilaian secara obyektif dan profesional. Tak lupa terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan AJK tahun ini," tuturnya.

Dalam Acara Puncak AJK 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba. Selain itu tampak hadir Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, dan Staf Ahli Menteri Kominfo Wijaya Kusumawardhana.

> "...jurnalis memiliki tanggung jawab besar

Tentang Anugerah Jurnalistik Kominfo

Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK) menjadi ajang apresiasi bagi para jurnalis yang turut andil berkontribusi dalam meliput upaya pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital masa depan, tentunya melalui program dan kebijakan strategis di sektor komunikasi dan informatika. Melalui AJK 2023, diharapkan para jurnalis ikut memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Peta Jalan Indonesia Digital.

Terdapat lima kategori lomba AJK, yaitu Kategori Liputan Media Cetak, Liputan Media *Online*, Liputan Televisi, Liputan Radio, serta Foto Jurnalistik. Selain itu untuk pertama kalinya di tahun ini, AJK memiliki kategori *Special Awarding*, yang dikhususkan bagi jurnalis berdasarkan kreativitas pemberitaannya mengenai isu-isu Kominfo.

Karya jurnalistik yang dapat diikutsertakan adalah karya asli milik peserta dan tidak mengandung unsur plagiarisme, serta memiliki informasi bermanfaat, proporsional, mengedukasi publik, harus memiliki keakuratan data, dan tentunya memenuhi unsur-unsur jurnalistik.

Pendaftaran karya dibuka sejak 19 Agustus 2023 hingga 19 Oktober 2023. Ratusan karya yang masuk kemudian diseleksi secara administrasi untuk memastikan bahwa karya yang lolos ke babak penjurian adalah karya yang memenuhi persyaratan umum dan khusus AJK 2023. Salah satu syarat utama adalah peserta merupakan jurnalis dari media yang terdaftar di Dewan Pers dan memiliki kartu anggota yang masih berlaku, atau sertifikasi kompetensi wartawan dari Dewan Pers.

> "...syarat utama adalah peserta merupakan jurnalis dari media yang terdaftar di Dewan Pers

Karya yang telah lolos seleksi administrasi kemudian dinilai oleh juri dari kalangan profesional yang berkompeten di bidangnya.

Tim Dewan Juri
Kategori Liputan Media Cetak

Agus Sudibyo
Dewan Pengawas LPP TVRI yang juga merupakan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers (2019-2022)

Jajang Jamaludin
Pemimpin Redaksi
Koran Tempo

Maria Y. Benyamin
Pemimpin Redaksi
Bisnis Indonesia

Tim Dewan Juri
Kategori Liputan Media Online

Asep Setiawan
Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers

Maman Suherman
Penulis Buku, Presenter, dan Konsultan Media & Kreatif

Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi
kompas.com

Tim Dewan Juri
Kategori Liputan Televisi

Kabul Indrawan
Senior Manager Research Center dari Media Group Network

Retno Pinasti
Pemimpin Redaksi
SCTV

Titin Rosmasari
Pemimpin Redaksi
CNN Indonesia

Tim Dewan Juri
Kategori Liputan Radio

Rosarita Niken Widiastuti
Widyaiswara Utama Kementerian Kominfo yang juga Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2010-2015

Soleman Yusuf
Kepala LPP RRI
Stasiun Luar Negeri

M. Rafiq
Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Tim Dewan Juri
Kategori Foto Jurnalistik

Agus Susanto
Fotografer Harian
Kompas

Dita Alangkara
Chief Photographer for Indonesia dari *Associated Press* (AP)

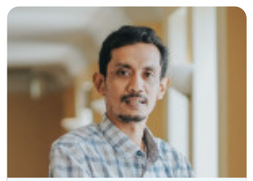

Prasetyo Utomo
Kepala Redaksi
Foto Antara

Pemenang AJK 2023

Kategori Liputan Media Online

Pemenang 1

Agustina Purwanti (kompas.id)

Ekonomi Digital Cenderung Semu Didominasi Komoditas Impor

Pemenang 2

Dhana Kencana (jateng.idntimes.com)

Tebengan Wifi Internet Burjo Bawa Keramik Salatiga Mendunia

Pemenang 3

Rendi Fadillah (sumateraekspres.bacakoran.co)

Digitalisasi Membangun Desa Wisata SAD

Kategori Liputan Media Cetak

Pemenang 1

Adi Wikanto (Kontan)

Skripsi Bikin Desa Sejiram Jadi Mandiri

Pemenang 2

Kismi Dwi Astuti (Pikiran Rakyat)

Digitalisasi dan Para Puan yang Mandiri: Koneksi Internet Belum Merata

Pemenang 3

Khairul Anam (Majalah Tempo)

Berburu Sisa Proyek Satelit

Kategori Liputan Televisi

Pemenang 1

Dian Widaningtyas dan Priyuda Anangga Dipa (CNN Indonesia TV)

Aplikasi Peringatan Dini Gunung Semeru

Pemenang 2

Azzi Fardiansyah (Kompas TV Jawa Barat)

Tol Udara Penghubung Niaga

Pemenang 3

Adinda Ramadhaning Kusumo dan Meta Nurjan (Kompas TV)

Iklim Berubah, Nelayan Tradisional Gundah

Kategori Liputan Radio

Pemenang 1

Ardi (RRI Merauke)

Kami Indonesia Sesungguhnya

Pemenang 2

Haryo Ristamaji (Radio Elshinta)

Rakyat Berhak Mendapatkan Akses Internet

Pemenang 3

Hikmat Raharjo Oetomo (RRI Denpasar)

Cuan Digital, Berniaga di Pasar Tradisional

Kategori Foto Jurnalistik

Pemenang 1

Adhi Wicaksono (CNNIndonesia.com)

Live Shopping Jadi Tren Belanja Online

Pemenang 2

Nur Chamim (Jawa Pos-Radar Semarang)

Menuju Indonesia Digital, Seluruh Sektor Strategis Ikut Bertransformasi

Pemenang 3

Zabur Karuru (LKBN Antara)

Persiapan KTT ASEAN

Momen

Puncak AJK 2023

Anugerah Jurnalistik Kominfo 2023 kembali hadir sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras jurnalis dalam menghadirkan informasi faktual bagi masyarakat. AJK 2023 sekaligus menjadi ajang unjuk karya, unjuk karsa, dan ruang ekspresi bagi jurnalis-jurnalis terbaik Indonesia.

Puncak AJK 2023 telah selesai diselenggarakan pada Kamis, 30 November 2023, dihadiri oleh seluruh finalis, tim dewan juri, serta pejabat tinggi Kementerian Kominfo. Simak berbagai momen keseruan Puncak AJK 2023.

NOMINASI 10 BESAR
FOTO JURNALISTIK
ADHI WICAKSONO
CNNINDONESIA.COM
LIVE SHOPPING JADI TREN BELANJA ONLINE
Anugerah Jurnalistik Kominfo 2023

Anugerah Jurnalistik Kominfo

ANUGERAH JURNALISTIK KOMINFO 2023
PEMENANG I
Adi Wiranto
ANUGERAH JURNALISTIK KOMINFO 2023
PEMENANG I
Dian Widiadnyana dan Priyanda Anangga Dipa

Anugerah Jurnalistik Kominfo

Anugerah
Jurnalistik
Kominfo
2023

Anugerah
Jurnalistik
Kominfo
2023

Anugerah
Jurnalistik
Kominfo
2023

Anugerah
Jurnalistik
Kominfo
2023

Anugerah
Jurnalistik
Kominfo
2023

Anugerah
Jurnalistik
Kominfo
2023

2023
Anugerah
Jurnalistik
Kominfo
KOMINFO

KOMINFO
Memasuki masa kampanye, #SobatKom perlu waspada dengan adanya hoaks yang merajalela.
Hoaks atau informasi keliru ini sengaja disebarkan di internet oleh oknum untuk menjatuhkan citra kandidat tertentu.
!
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Soal Dugaan Kebocoran Data DPT, Menkominfo Instruksikan Usut Tuntas

Menteri Komunikasi dan Informatika telah menugaskan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan untuk menelusuri dugaan kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara tuntas.

"Memang tadi dari pagi sudah mendapat pertanyaan dari pada media soal kebocoran data di KPU. Jadi, saya sudah menugaskan Dirjen Aptika untuk melakukan penelitian apa penyebabnya dan bagaimana mengantisipasinya," ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Menteri Budi Arie menyatakan saat ini Kementerian Kominfo belum dapat memastikan adanya kebocoran DPT. Menurutnya, saat ini Kementerian Kominfo tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Nah, kalau data DPT itu kan semua partai peserta Pemilu kan pasti dapat, dan hal itu sesuai Undang-Undang. Caleg juga pasti memegang data DPT dapilnya kan? Oleh karena itu, Kominfo masih menyelidiki kasus ini dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Di antaranya KPU hingga BSSN, untuk terus mengantisipasi soal keamanan IT KPU," tuturnya.

Menkominfo menyatakan sejauh ini masih menunggu informasi lebih detail dari KPU terkait dugaan kebocoran data tersebut.

"Sehingga Kominfo belum dapat menyimpulkan sebelum adanya laporan dari lembaga terkait. Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis, motifnya ekonomi dengan pengertian jualan data," jelasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, dugaan kebocoran data itu harus menjadi peringatan untuk seluruh pihak penyelenggara Pemilu untuk memperkuat keamanan data dan menjaga sistem dengan lebih baik. Menkominfo mengharapkan tidak ada saling menyalahkan atau bahkan mendiskreditkan KPU.

"Kita tidak mau menyalahkan, sehingga kita sama-sama jagalah, yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diverifikasi oleh aparat penegak hukum dan ini peringatan juga buat KPU untuk menjaga sistem lebih baik," tegasnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan telah mengetahui dugaan kebocoran data KPU sejak Selasa (28/11/2023) malam. Setelah mengetahui hal itu, Dirjen Semuel menyatakan Kementerian Kominfo telah meminta klarifikasi kepada KPU dengan mengirimkan surat melalui email.

> **"...kementerian Kominfo telah meminta klarifikasi kepada KPU**

“Per tadi malam semenjak kami mendengar di sosial media, sesuai SOP dan amanat Undang-Undang, kami langsung meminta klarifikasi kepada KPU sesuai SOP dan karena amanat Undang-Undang harus independen, kami memang sudah menyurat dan kita menunggu. Kami berikan waktu 3 hari untuk merespons,” jelasnya.

Selama menunggu jawaban dari KPU, Kementerian Kominfo terus mengumpulkan data dan melakukan penelusuran sesuai amanat regulasi.

“Kami melakukan penelusuran awal dengan mengumpulkan data-data yang sudah ada di publik. Saat ini Kementerian Kominfo belum bisa menyimpulkan dan masuk pengauditan secara mendalam. Ini kan datanya sekunder, data-datanya sedang kami kumpulkan baik kami mengambil data-data yang ada di sosial media maupun yang si pelakunya sebarkan ini kita analisa,” tuturnya.

Dari penelusuran awal Dirjen Semuel menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi ada kemiripan format data yang bocor dengan data DPT yang diproses KPU. Namun, Kementerian Kominfo belum bisa memastikan asal data yang bocor tersebut karena membutuhkan analisis lebih mendalam.

“Jadi kami belum bisa masuk, perlu kita telusuri lebih dalam lagi. Pada saat ini terlalu prematur untuk menetapkan apapun sebelum kami mendapatkan klarifikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU yaitu PSE harus memberikan respon tiga hari setelah kami minta klarifikasi," ungkapnya.

Untuk penanganan lebih lanjut mengenai dugaan kebocoran DPT di KPU, Kementerian Kominfo juga berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri.

“Kami sebagai sebagai pengampu saat ini sebelum terbentuknya lembaga baru, wajib memastikan pengendali melaksanakan compliance (kepatuhan) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,” jelas Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Sebelumnya, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI menyoroti secara khusus dugaan kebocoran data DPT. Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menyatakan

Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang tersebut, pengelola data pribadi wajib menjamin keamanan data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dan dikelolanya.

“KPU dan lembaga lain yang menjadi pengelola data pribadi harus memberikan penjelasan dan jaminan keamanan. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus bergerak dalam menyelidiki sosok peretas dan penjual data pribadi tersebut,” ungkapnya.

Wamen Nezar Patria Tantang Anak Muda Bangun IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota masa depan yang modern dengan infrastruktur teknologi canggih serta adaptif terhadap lingkungan hidup.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menantang generasi muda yang berani menerima tantangan untuk bersama-sama membangun IKN.

“Pembangunan IKN akan membutuhkan waktu yang lama dan perlu upaya yang konsisten untuk dapat mewujudkan IKN seperti yang dicita-citakan,” ungkapnya dalam acara *Voice of Nusantara*: Kota Dunia Untuk Semua di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Menurut Wamenkominfo, perpindahan ibukota ke IKN tidak hanya sekadar mencari lokasi ibukota lain untuk menggantikan DKI Jakarta yang sudah makin padat. Lebih dari itu pembangunan IKN menjadi bagian dari upaya membangun masa depan Indonesia menjadi lebih baik.

"Selain dengan pertimbangan bahwa Jakarta, ibukota kita sekarang yang sudah begitu padat dengan kemacetan yang luar biasa, ada alasan lain yang jauh lebih futuristik ke depan tentang masa depan Indonesia itu sendiri ke depan," jelasnya.

> **“Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota masa depan yang modern dengan infrastruktur teknologi canggih...**

Wamen Nezar Patria menjelaskan gagasan untuk memindahkan ibukota ini bukan hal yang baru, namun sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno.

"Ibu Kota Nusantara ini adalah mimpi besar, bukan hanya para penggagasnya atau para pemikirnya, tapi ini adalah mimpi besar besar kita semua, Bangsa Indonesia," tandasnya.

IKN akan dibangun dengan konsep *smart city* yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi yang canggih. Selain itu IKN juga akan menjadi kota yang memiliki kawasan hijau dengan hutan alam yang luas untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim.

"Di abad 21 ini tantangan kita yang paling terbesar adalah *climate change*," tegas Wamenkominfo.

Wamen Nezar Patria menyatakan nantinya akan menjadi kota yang paling modern di Indonesia. Menurutnya, pemindahan ibukota merupakan upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia yang selama ini lebih banyak berpusat di Pulau Jawa.

"Pindah ibukota mungkin bukan pekerjaan satu malam pastinya, harus dengan satu upaya yang terus-menerus, gigih, konsisten, sehingga dia baru tercipta," tegasnya.

Dalam acara yang digelar Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo bersama dengan LPP RRI itu hadir Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong, Direktur Utama RRI I Hendratmo, Direktur IKPM Ditjen IKP Kominfo Septriana Tangkary, Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw, Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kerja Sama dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN Panji Himawan, Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atyanto Busono.

> **...IKN juga akan menjadi kota yang memiliki kawasan hijau dengan hutan alam yang luas untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim**

Kominfo Libatkan PIP Edukasi Masyarakat Ciptakan Pemilu Damai 2024

> **...memberi informasi pada masyarakat agar tidak terjebak hoaks politik**

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan diseminasi informasi mengenai Pemilihan Umum Serentak 2024 secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan edukasi intensif kepada para Penyuluh Informasi Publik (PIP).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyatakan edukasi yang diberikan menjadi bekal bagi para PIP untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam Pemilu 2024 dengan meninggalkan politik SARA, mengampanyekan anti hoaks, antisipasi SARA hingga memeriksa calon yang akan dipilih dengan seksama.

"Intinya adalah Pemilu Damai, mengajak masyarakat untuk memberi hak pilihnya di 14 Februari 2024 nanti. Edukasi ini juga terkait memberi informasi pada masyarakat agar tidak terjebak hoaks politik," jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

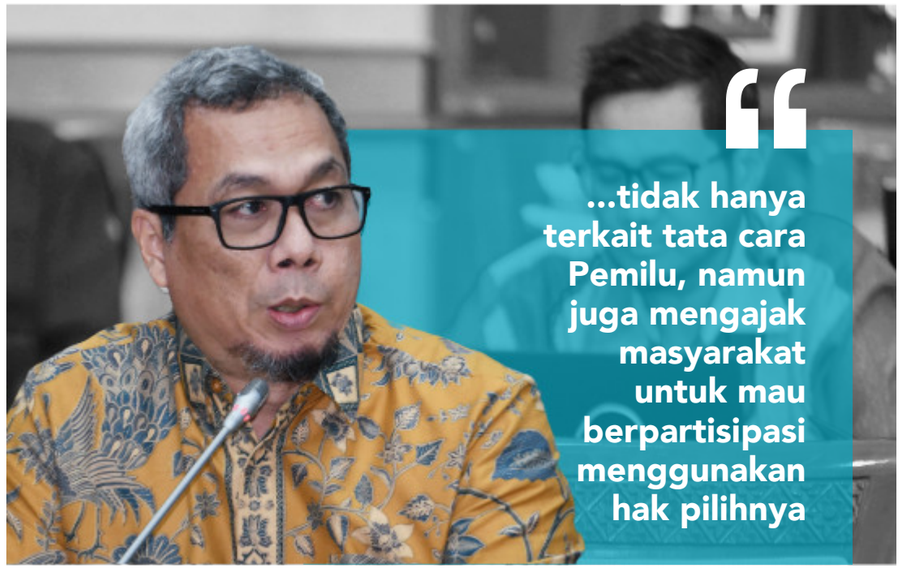

Dirjen Usman Kansong menyatakan Program PIP merupakan upaya Kementerian Kominfo memberikan informasi kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau infrastruktur telekomunikasi. Program yang telah berjalan sejak tahun 2017 itu melibatkan Kementerian Agama dengan pemberdayaan Penyuluh Agama.

Secara berkala, PIP menyebarluaskan informasi berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat agar lebih mudah dipahami dengan baik, tepat guna dan memberikan manfaat optimal.

"Jadi, PIP ini sebagai *follow up* dalam Pemilu untuk menyampaikan ide masyarakat sebagai pengawas ketika raker dengan Plt Menkominfo Pak Mahfud beberapa waktu lalu yang bermaksud mengundang KPU juga Bawaslu, tetapi memang ada dalam aturan karena pengawas Pemilu harus terdaftar dan berupa organisasi." tuturnya.

Sebagai *Key Opinion Leader* di lingkungan tempat tinggal, PIP dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda. Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo hal itu dilatari faktor kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitas masing-masing.

"Informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima di hati masyarakat. Informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima baik oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu, dapat terpecahkan melalui peran besar PIP. Peran PIP menjadi vital di masyarakat khususnya menjelang Pemilu 2024, karena para penyuluh bertugas menyampaikan tidak hanya terkait tata cara Pemilu, namun juga mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi menggunakan hak pilihnya," ungkapnya.

Hingga tahun 2023, Kementerian Kominfo telah melibatkan 517 orang PIP yang aktif bertugas mendiseminasikan informasi berbagai program dan kebijakan strategis Pemerintah dari Sabang hingga Merauke.

"Tidak banyak tetapi mungkin kita bisa galang untuk katakanlah melaporkan. Bahkan, kami sampaikan potret saja kalau ada pelanggaran-pelanggaran hasil pemilu. PIP ini adanya di 3T, itu yang kami lakukan," tandas Dirjen Usman Kansong.

Kolaborasi Kembangkan Large Language Model Mutakhir

Indonesia tengah mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bagian *Large Language Model* (LLM) untuk implementasi teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

Sebagai model bahasa mutakhir, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengharapkan dapat segera dimanfaatkan berbagai pihak secara luas.

"Apalagi untuk membuat satu *foundation model* sendiri untuk LLM. Saya kira ini yang paling sulit, karena kalau pemakaian Chat GPT sekarang lebih *on top* dari *foundation model* itu," jelasnya dalam *Press Conference* Kerja Sama Pengembahan *Large Language Model* Bahasa Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

> **...pengembangan foundation model dan untuk menghimpun pemakaian dengan content type bahasa yang ada di ASEAN merupakan satu misi yang luar biasa**

Menurut Wamenkominfo, setiap individu bisa membuat aplikasi apapun, namun pengembangan *foundation model* dan untuk menghimpun pemakaian dengan *content type* bahasa yang ada di ASEAN merupakan satu misi yang luar biasa.

"Ditambah bahasa-bahasa yang ada di Nusantara itu luar biasa lagi. Kita ada ratusan bahasa daerah yang bisa dimasukkan ke situ. Pasti akan membuat satu dasar aplikasi-aplikasi yang sangat berguna nantinya," tuturnya.

Wamen Nezar Patria memberikan contoh *Infocomm Media Development Authority* Singapura yang tengah mengembangkan *software AI verified*. *Software* itu bisa digunakan pengembang AI untuk memeriksa kesesuaian model merujuk pada berbagai prinsip etika AI global.

"Tata kelola AI di Singapura juga didukung keterlibatan *advisory council on the ethical use of AI and data* dalam mendampingi pemerintah dalam melakukan pengembangan kebijakan etika dan tata kelola AI," tuturnya.

Sementara itu, di Bangladesh, Microsoft mengembangkan program aplikasi untuk bisa menerjemahkan petunjuk-petunjuk memaksimalkan hasil pertanian dalam beragam bahasa. Seperti Bahasa Urdu yang dipakai oleh petani yang ada di pelosok Bangladesh.

"Biasanya mereka jarang berhubungan menggunakan *chat* atau *messenger*. Cukup pakai *voice* (bicara) dan mereka bisa saling berkomunikasi di antara suku-suku yang ada di sana untuk bisa melakukan *trading*, *sharing*, dan juga memaksimalkan usaha pertanian," jelas Wamenkominfo.

Wamen Nezar Patria mengapresiasi kerja sama Kolaborasi Riset & Inovasi Kecerdasan Artificial Indonesia (Korika), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Glair.ai, Datasaur.ai, dan AI Singapore itu.

"Upaya ini tidak hanya dilaksanakan pemerintah, tetapi juga oleh lembaga riset serta pelaku industri. Tentu saja proyeksi Sea-Lion yang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan dari GDP Venture (Glair,ai dan Datasaur.ai) dan AI Singapore (AISG) merupakan inisiatif yang sangat baik," ungkapnya.

Wamenkominfo Nezar Patria mengharapkan inisiasi proyek kolaboratif akan bisa berkembang dan dapat menginspirasi berbagai inisiatif serupa. Bagaimanapun, Pemerintah akan terus mendorong pengembangan teknologi AI dengan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risiko negatifnya.

"Itu saya kira *standpoint* pemerintah pada saat ini, agar inovasi-inovasi AI bisa berkembang dan sekaligus kita juga bisa memonitor, memitigasi risiko yang akan muncul," tandasnya.

Dalam konferensi pers itu hadir Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, Kepala Pusat Penelitian Ilmu Data dan Informasi BRIN Esa Prakarsa, CTO GDP Venture/CEO GDP Labs On Lee, dan Presiden Korika Hammam Riza.

Lawan Hoaks, Menkominfo: Kami Tangani dari Hulu ke Hilir

Penyebaran hoaks dan disinformasi membuat masyarakat pengguna media sosial meragukan keaslian informasi yang didapat dari internet. Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan Kementerian Kominfo memiliki alur penanganan hoaks dari hulu ke hilir untuk mencegah penyebaran disinformasi di ruang digital.

"Terlebih ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan disinformasi untuk memanipulasi opini masyarakat."

Pihak asing menggunakan disinformasi untuk memanipulasi opini masyarakat termasuk melalui penggunaan *buzzer*, terutama ketika memasuki masa Pemilu," ujarnya dalam acara *Data Science Weekend 2023: Nurturing Data AI and Digital Talent for Tomorrow* di Telkomsel *Smart Office*, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Menteri Budi Arie mengatakan melalui berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pemerintah terus berupaya melakukan penanganan hoaks dan disinformasi secara komprehensif.

"Harapannya melalui upaya tersebut, ketahanan informasi kita akan semakin kuat, produktif, dan sehat," ungkapnya.

> **"...ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan disinformasi untuk memanipulasi opini masyarakat**

> ...disinformasi di ruang digital dapat menyebabkan polarisasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi

Upaya Kementerian Kominfo dalam menjaga ruang digital tetap sehat dengan menerapkan tiga pendekatan. Pada tingkat hulu, Kementerian Kominfo melakukan peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya melalui Gerakan Nasional Literasi Digital.

"Di tahap ini kami mendorong masyarakat untuk menyaring informasi yang didapat secara proaktif dan mandiri dan dalam hal ini kami bermitra dengan komunitas, akademisi, dan institusi pemerintahan lainnya," jelas Menkominfo.

Pada tingkat menengah, Kementerian Kominfo melakukan pengecekan fakta dan validasi informasi yang mengandung hoaks melalui moderasi konten dan pemutusan akses konten hoaks.

"Sementara pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo mendukung penegakan hukum oleh aparat penegak hukum," tegas Menteri Budi Arie.

Menkominfo menyatakan disinformasi di ruang digital dapat menyebabkan polarisasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta masyarakat mewaspadai teknologi seperti personalisasi pengguna dan kecerdasan buatan (AI) yang disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi di ruang digital.

"Perkembangan teknologi juga dapat disalahgunakan untuk penyebaran disinformasi seperti penggunaan data untuk personalisasi referensi berita hingga penggunaan *deepfake* atau *speech synthesis*," ujarnya

Menkominfo mendorong masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi yang diterima melalui lembaga dan media yang kredibel.

Dalam acara itu hadir Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam dan jajaran direksi Telkomsel, Ketua Data Science Indonesia Nabil Muhsin Badjri, serta peserta seminar *Data Science Weekend 2023*.

Jaga Kualitas Layanan Telekomunikasi, Kominfo Operasikan Pusat Monitoring

Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya memeratakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia.

Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Dany Suwardany mengatakan salah satu upaya untuk memastikan kualitas layanan telekomunikasi, pos, dan penyiaran adalah dengan menyediakan fasilitas Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT).

"Dalam rangka memastikan bahwa kualitas layanan dari telekomunikasi, pos, dan penyiaran berjalan dengan baik, maka salah satunya yang kita lakukan adalah dengan membangun atau menyiapkan Pusat Monitoring Telekomunikasi atau kita singkat dengan PMT, yang terintegrasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan telekomunikasi, pos, dan penyiaran," jelasnya dalam acara Sosialisasi Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran di Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Kunjungi KAIT, Ditjen SDPPI Benchmark Penanganan Perangkat Hilang atau Dicuri

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo melaksanakan pertemuan dengan *Korean Agency for ICT Promotion* (KAIT) untuk mempelajari pengelolaan dan penanganan perangkat telekomunikasi yang hilang maupun dicuri (*lost and stolen device*).

Delegasi SDPPI disambut oleh *Vice President* KAIT Mr Changhee Lee beserta tim, yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis layanan *lost and found* di Korea. *Vice President* KAIT menyampaikan harapannya agar kolaborasi KAIT dan Kominfo dapat dikembangkan di masa depan untuk berbagai lingkup kerjasama bidang TIK.

Direktur Standardisasi PPI, Mulyadi, dan didampingi Nur Akbar Said dan Anak Agung Gede Oka dari Direktorat Standardisasi PPI serta Arie Wahyu Triansyah dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi bersama Tim Teknis KAIT melakukan *sharing* informasi dan mendapatkan penjelasan tentang IMEI *Integrated Management Center and Mobile Phone Lost and Found Center*. Tim Direktorat Standardisasi memberikan gambaran terkait proses registrasi dan pengelolaan IMEI di Indonesia.

Di Korea, apabila terjadi kehilangan ataupun kecurian handphone, pemilik *handphone* dapat memblokir perangkat handphonenya secara mandiri menggunakan fitur IMEI blokir yang tersedia dalam akun mereka di *website* operator seluler. Kemudian permintaan blokir ini dikelola oleh KAIT. Dengan adanya pemblokiran IMEI handphone ini, perangkat *handphone* otomatis sudah tidak dapat digunakan lagi.

> **...harapannya agar kolaborasi KAIT dan Kominfo dapat dikembangkan di masa depan**

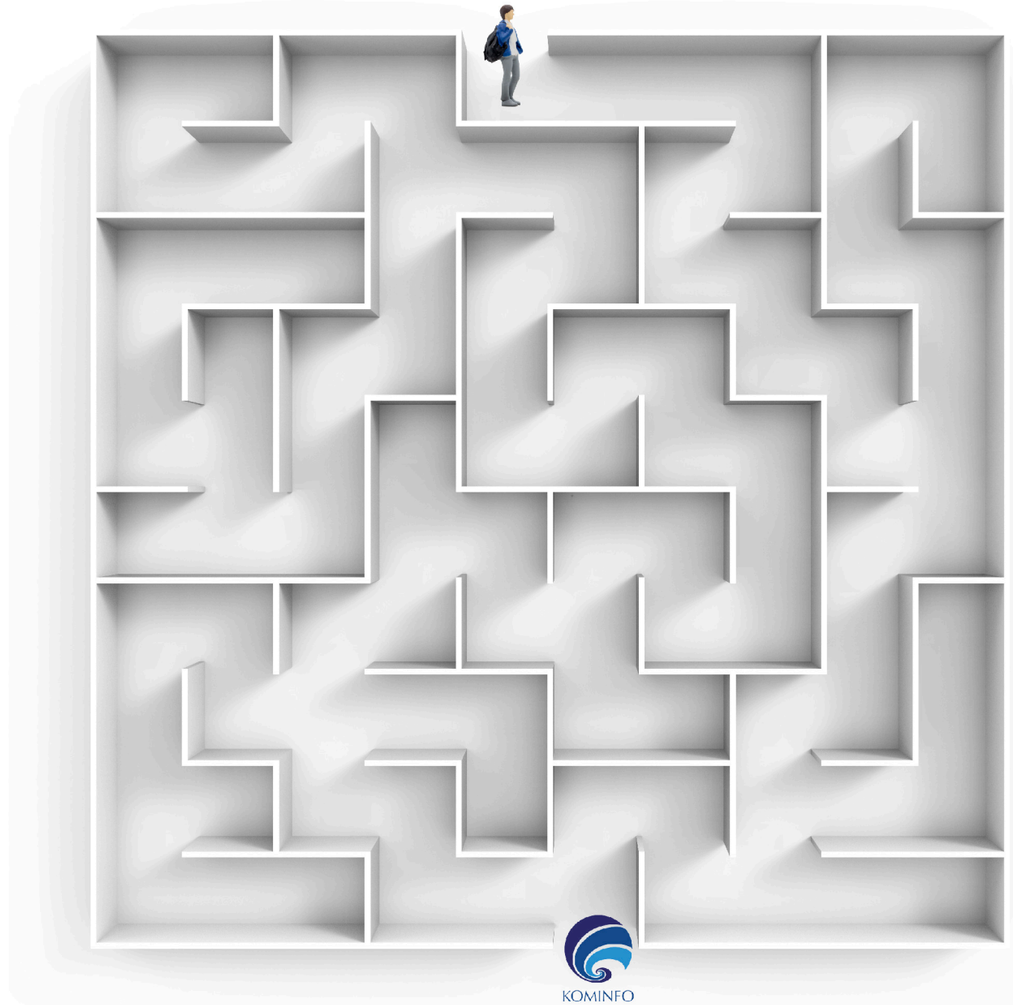

Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

- @Kemenkominfo
- @kemkominfo
- Kemkominfo
- Kemkominfo TV
- @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment

KOMINFO

Peringatan
HARI PAHLAWAN

10 November

"Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa
dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan"

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA